

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGODOW



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
(LKIP)**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan LKIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban BAPPEDA Kabupaten Bolaang Mongondow dalam melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah selama Tahun Anggaran 2025. Laporan ini disusun sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

LKIP BAPPEDA Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 memuat informasi mengenai perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi serta analisis atas capaian kinerja yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang transparan dan akuntabel mengenai pelaksanaan tugas BAPPEDA sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja serta penyusunan laporan di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, kerja sama, serta kontribusi dalam pelaksanaan tugas dan penyusunan LKIP ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Lolak, Januari 2026

**KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**


DR. MUTU BULAN MOKOGINTA, SE, M.Si

**Pembina Utama Muda
NIP. 19710409 199803 1 013**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh.....	9
E. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow	11
F. Sistematika Penyajian.....	13
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	18
C. Rencana Kinerja Tahunan	18
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	19
E. Rencana Kinerja Program.....	20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
B. Realisasi Anggaran	48
BAB IV. PENUTUP	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik menuntut setiap instansi pemerintah untuk mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah melalui perencanaan yang terarah, pengukuran kinerja yang jelas, serta pelaporan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu implementasi dari penerapan SAKIP adalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. LKIP merupakan media untuk menyampaikan informasi mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dalam perencanaan pembangunan daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. BAPPEDA bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAPPEDA Kabupaten Bolaang Mongondow menyusun berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen-dokumen tersebut menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan agar berjalan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BAPPEDA Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025. Laporan ini memuat informasi mengenai perencanaan kinerja, capaian kinerja, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BAPPEDA.

Melalui penyusunan laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat pencapaian kinerja organisasi serta menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja organisasi pada periode berikutnya. Selain itu, LKIP juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Bolaang Mongondow.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Menurut UU 25/2004 Pasal 33 ayat (2) ditegaskan bahwa “dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda”. Pasal 33 ayat (3): “Kepala Bappeda menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai tugas dan kewenangannya”.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow serta ditetapkannya Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A Kabupaten Bolaang Mongondow, bahwa Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Sedangkan fungsi Bappeda meliputi:

1. Menyusun rencana program dan kegiatan dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
2. Melaksanakan program dan kegiatan dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan program dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
4. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan
5. Melaksanakan pembinaan pegawai di Bappeda
6. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja
7. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir

8. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 32 Tahun 2022 tanggal 20 Oktober Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Kategori Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah Tipe A, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki struktur organisasi 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretaris dengan dibawahnya 1 Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan 1 (satu) fungsional perencana, serta 5 (lima) Kepala Bidang dengan masing-masing dibawahnya kelompok jabatan fungsional.

Struktur Organisasi Bappeda terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris Badan membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Fungsional Perencana pada sekretariat
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - a. Fungsional Perencana pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia:
 - a. Fungsional Perencana pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam:
 - a. Fungsional Perencana pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan:
 - a. Fungsional Penata Ruang pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - a. Analis Data ilmiah pada Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - b. Analis Pemanfaatan IPTEK pada Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Rincian tugas pokok dan fungsi Bappeda ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala Badan

- a. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan sosial budaya serta bidang penelitian dan pengembangan di Daerah.
- b. Kepala Badan mempunyai fungsi:
 - Menyusun rencana program dan kegiatan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - Melaksanakan program dan kegiatan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - Mengoordinasikan pelaksanaan program dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - Melaksanakan pembinaan pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja;
 - Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;
 - Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

2. Sekretariat Badan

- a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas penyelenggaraan koordinasi administrasi, penyusunan kebijakan, pelayanan administrasi umum, hukum, kepegawaian, keuangan, program dan pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
- b. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:
 - pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang dan jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- melakukan pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang dan jasa milik negara; dan
- melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas:

- a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- c. melakukan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. mengintegrasikan dan mengharmonisasi program-program pembangunan daerah;
- e. merumuskan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- f. mengoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;

- h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
 - j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
 - k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - l. penyusunan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - n. melakukan pengelolaan hasil analisis, hasil evaluasi untuk menyiapkan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - o. melakukan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD} di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan, dan kearsipan, sosial, kebudayaan, ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dan persandian;
 - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan, dan kearsipan, sosial, kebudayaan, ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dan persandian;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, pemuda dan

olahraga, tenaga kerja, perpustakaan, dan kearsipan, sosial, kebudayaan, ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dan persandian;

- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga di provinsi dan kabupaten;
- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan serta komunikasi dan informatika;
- b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dari RKPD) di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan serta komunikasi dan informatika;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan serta komunikasi dan informatika;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten;

- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah;
 - j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
 - k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 - l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan
- Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas:
- a. melakukan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan;
 - b. melakukan penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan;
 - c. melaksanakan penelitian dan pengembangan di pemerintahan;
 - d. melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
 - e. melaksanakan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
 - f. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - g. mengoordinasikan dan mensinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan;
 - h. melaksanakan administrasi penelitian dan pengembangan daerah; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
7. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang perencanaan pembangunan ekonomi. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, bidang ekonomi mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, pariwisata, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pertanian, pangan kelautan dan perikanan;

- b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, pariwisata, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pertanian, pangan kelautan dan perikanan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, pariwisata, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pertanian, pangan kelautan dan perikanan;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga di provinsi dan kabupaten;
- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

D. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh

1. Kepegawaian

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah didukung oleh 32 orang Pegawai Negeri Sipil, yang mayoritas berpendidikan S1 serta memiliki keterampilan yang memadai yang merupakan potensi sumberdaya manusia (SDM) sebagai pendukung Organisasi Bappeda dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang cukup strategis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun komposisi pegawai dapat dirinci sebagai berikut:

a. Berdasarkan jenis kelamin

Tabel 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

LAKI -LAKI	PEREMPUAN
17 Orang	14 Orang

b. Berdasarkan tingkat pendidikan:

Tabel 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
Strata 3	1
Strata 2	4
Strata 1	21
SMA/SMK	5

c. Berdasarkan Golongan

Tabel 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah (orang)
IV	6
III	22
II	1
V (PPPK)	2

d. Berdasarkan Jabatan/Eselon

Tabel 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon

Eselon	Jumlah (orang)
Eselon II	1
Eselon IIIa	-
Eselon IIIb	5
Eselon IV	1
Pejabat Fungsional	10
Pelaksana	14

2. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok dibidang perencanaan pembangunan daerah, BAPPEDA didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, baik sarana dan prasarana yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Untuk mendukung mobilitas kerja, BAPPEDA mempunyai 2 (dua) unit kendaraan roda empat yang tergolong dalam

keadaan rusak ringan sehingga memerlukan perawatan yang ekstra. Dalam penggunaannya memerlukan pertimbangan khusus terutama dalam menjangkau daerah-daerah di kecamatan dan desa yang cukup banyak dan memiliki jarak yang cukup jauh dari Ibukota Kabupaten. Kedepannya perlu dipertimbangkan pengadaan kendaraan dinas operasional yang memadai untuk menjangkau daerah-daerah tersebut dalam hal perencanaan dan pengendalian pembangunan. BAPPEDA memiliki kendaraan roda dua sebanyak 1 (satu) unit dan sampai dengan saat ini masih dalam penguasaan bidang terkait pada Badan Keuangan Daerah. Begitu pula dengan barang bergerak lainnya seperti Laptop/Notebook dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. Pengadaan terbaru untuk laptop/notebook dilaksanakan pada akhir tahun 2025 dengan peruntukkan pada pejabat Fungsional dan pelaksana di Bappeda.

3. Anggaran

Untuk melaksanakan Program Kerja dan Kegiatan Tahun 2025, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang dialokasikan pada APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 adalah, sebesar 6.961.350.860,00 yang terdiri dari 4 (empat) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan.

E. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam pelaksanaan sebagian tugas Bupati dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

1. Menyusun rencana program dan kegiatan dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
2. Melaksanakan program dan kegiatan dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan program dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
4. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan
5. Melaksanakan pembinaan pegawai di Bappeda
6. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja

7. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir
8. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Peningkatan kualitas perencanaan menjadi salah satu fokus utama dalam kelembagaan Bappeda untuk dapat menjawab berbagai permasalahan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai fungsi penunjang yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintah, urusan perencana pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan, tentu dalam melaksanakan fungsi tersebut berpedoman pada RPD Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023-2026 dimana identifikasi permasalahan pembangunan jangka menengah dilakukan berdasarkan permasalahan pembangunan daerah yang muncul diberbagai bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2023-2026 yang mempengaruhi keberhasilan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada periode tersebut dan/atau diperkirakan akan berdampak signifikan bagi daerah dan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow dimasa mendatang. Permasalahan perencanaan pembangunan jangka menengah Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow dirumuskan berdasarkan identifikasi permasalahan pada tiap urusan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow.

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	Kualitas Perencanaan Belum Optimal	Kurang optimalnya basis pengetahuan dalam proses penyusunan perencanaan	1. Belum optimalnya Ketersediaan / basis data 2. Belum maksimalnya kualitas Data dan Kajian bahan penyusunan Perencanaan Pembangunan 3. Belum optimal penguasaan Ilmu pengetahuan dan teknologi 4. Belum optimal kreatifitas SDM 5. Belum optimal monitoring dan evaluasi perencanaan
		Belum optimalnya penerapan hasil kelitbang dalam pengambilan kebijakan	1. Kerjasama Litbang belum searah dengan RPJMD; 2. Belum optimal SDM Litbang;

			3. Belum ada prosedur Litbang; 4. Belum ada ukuran produk kelitbangan.
--	--	--	---

F. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama Tahun 2025. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasi hanya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan,

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II – Perencanaan Kinerja,

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025,

Pada bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

Bab IV – Penutup,

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran - lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan dengan tetap mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Bolaang Mongondow yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026.

1. Visi

"Bolaang Mongondow yang Baru, Berbudaya, Berdaya Saing dan Mandiri Sebagai Lumbung Pangan Indonesia Timur"

2. Misi

1. Mewujudkan Bolaang Mongondow yang berbudaya dan berdaya saing;
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri bertumpu pada potensi sumberdaya lokal;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Demokratis dan Bebas KKN;
5. Mewujudkan Bolaang Mongondow Sebagai Lumbung Pangan di Indonesia Bagian Timur.

Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) dan jangka pendek (RKPD) yang sinergis, partisipatif dan akuntabel. Dokumen perencanaan pembangunan daerah ini akan digunakan sebagai pedoman/acuan seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana strategis dan Renja Perangkat Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut di atas Bappeda akan berperan mendukung visi Bupati Bolaang Mongondow dengan misi "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Demokratis dan Bebas KKN"

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Tujuan yang ingin dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah *"Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas"*

4. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun periode RPD 2023-2026, 4 (empat) tahun dan dialokasikan dalam 4 periode secara tahunan. Sasaran yang ingin dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Meningkatkan Daya Saing Daerah melalui Inovasi.

5. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan RPD kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026.

Strategi dan kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil

rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran jangka menengah, maka untuk mencapainya dipilih strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 6
Strategi Yang Ditetapkan Dalam Rangka Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Melalui Kebijakan.

No	Strategi	Arah Kebijakan
1	Optimalisasi perencanaan dan Pengendalian Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Meningkatkan kualitas perencanaan bidang Infrastruktur dan kewilayahan
		Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program bidang Infrastruktur dan kewilayahan
2	Optimalisasi perencanaan dan Pengendalian Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Meningkatkan kualitas perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
3	Optimalisasi perencanaan dan Pengendalian Bidang Perekonomian dan SDA	Meningkatkan kualitas perencanaan bidang Perekonomian dan SDA
		Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program bidang Perekonomian dan SDA
4	Optimalisasi perencanaan dan Pengendalian Bidang Perencanaan Pengendalian dan evaluasi pembangunan	Meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan daerah
		Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program Daerah
		Meningkatkan kualitas data pembangunan daerah
5	Optimalisasi Penelitian dan Pengembangan untuk mendorong inovasi daerah	Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan kebijakan pembangunan daerah
		Meningkatkan fasilitasi inovasi daerah

6. Program dan Kegiatan

a. Program dan Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Adminstrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

- Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Tabel 7 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	FORMULA	KONDISI AWAL RENSTRA	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-			
						2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas		Nilai Rata Rata Capaian Opini BPK, Nilai Sakip, LPPD, Indeks Pelayanan Publik	Hasil Penelitian oleh BPK, KemenPAN dan RB dan Ombudsman dituangkan kedalam Nilai Rata-Rata Angka perolehan Nilai.	71,01	77,5	83,5	84,75	87,75
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	60% sasaran Kabupaten + 20% sasaran Perangkat Daerah + 20% Capaian Program Perangkat daerah	90	92	93	94	95
		Meningkatkan Daya Saing daerah melalui Inovasi	Indeks Inovasi Daerah	Hasil Penelitian Kemendagri atas pelaksanaan Inovasi Daerah	7,28	25	30	30	35
2	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik Organisasi Perangkat Daerah		Indeks Pelayanan Publik Organisasi Perangkat Daerah	Hasil penelitian Ombudsman	57,09	75	75	90	95
		Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan	Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	Hasil Penelitian oleh KemenPAN dan RB	58,6	63	70	73	78

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama BAPPEDA Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan tugas dan fungsinya. Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8 Indikator Kinerja Utama Bappeda Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	FORMULA	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan (%)	60% sasaran Kabupaten + 20% sasaran Perangkat Daerah + 20% Capaian Program Perangkat daerah	94%
2	Meningkatkan Daya Saing daerah melalui Inovasi	Indeks Inovasi Daerah	Hasil Penilaian Kemendagri	30

C. Rencana Kinerja Tahunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A Kabupaten Bolaang Mongondow, mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Eksistensi Bappeda sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu

- Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah;
- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencanaan pembangunan daerah. Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan sekarang dan kedepan di daerah dengan mengacu pada RPJM Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tahun 2023-2026 yang telah disusun, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) telah menyusun target Rencana Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 9 Rencana Kinerja Tahunan Bappeda

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.	Indeks Perencanaan Pembangunan	94%
2.	Meningkatnya Daya Saing Daerah Melalui Inovasi.	Indeks Inovasi Daerah	30

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang tertuang dalam RPD dan dijabarkan dalam Rencana Strategis Bappeda tahun 2023-2026, maka disusunlah Perjanjian Kinerja antara Kepala Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Bupati Bolaang Mongondow dalam bentuk Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 10 Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	93	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 631.030.722,60
			90	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 832.052.166,00
2.	Meningkatnya Daya Saing Daerah Melalui Inovasi	Indeks Inovasi Daerah	30	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 266.284.882,00

Uraian secara lengkap Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 tercantum pada lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah ini.

E. Rencana Kinerja Program

Rencana Program Tahun 2025 sebagai penjabaran lebih lanjut dari kebijakan dan sasaran atau cara untuk mencapai tujuan. Program-program yang merupakan garis besar dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda selama kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan merupakan penterjemahan dari kebijakan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan.

Adapun Rencana Program dari Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 dalam pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (SDM), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Tahun 2025 adalah Tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD. Pada tahun 2025 Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow merencanakan 4 Program dan 14 Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 6.961.350.860,60 (*Enam Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah koma enam puluh*).

Rangkaian Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dituangkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 11

Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan		Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran setelah Perubahan		Anggaran (Rp)
			Tolak Ukur	Target	
	BAPPEDA				6.961.350.860,60
	Perencanaan				6.695.065.978,00
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	93%	5.231.983.090,00
	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 Dokumen	4.214.923.413,00
	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			29.247.500,00
	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Dokumen	436.038.752,00
	4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	11 Unit	226.629.800,00
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	12 Bulan	142.831.800,00
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	70 Unit	182.311.825,00
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persentase Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	90%	631.030.722,60
	1	Peyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan, pendanaan dan evaluasi	6 Dokumen	464.237.637,60
	2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah yang tersedia	6 Masukan	15.681.411,00
	3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	7 Laporan	151.111.674,00

3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase capaian Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Dilaksanakan	90%	832.052.166,00
	1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat daerah yang diasistensi perencanaannya	21 OPD	442.797.681,00
	2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah Perangkat daerah yang diasistensi perencanaannya	11 OPD	167.750.800,00
	3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat daerah yang diasistensi perencanaannya	9 OPD	221.503.685,00
	Penelitian dan Pengembangan				266.284.882,00
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase inovasi hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah yang dilaksanakan	90%	266.284.882,00
	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan yang tersedia	15 Dokumen	123.092.179,00
	2	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan pengembangan inovasi dan teknologi	5 Laporan	143.192.703,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengaju pada Penetapan Kinerja Tahun 2025. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sampai dengan Tahun 2025, Secara umum berhasil dengan baik. Hal ini dapat digambarkan dengan dilaksanakannya 4 (Empat) program utama yang telah ditetapkan dalam sasaran Tahun 2025.

Untuk mewujudkan berbagai kegiatan dimaksud memerlukan tenaga aparatur yang professional, sarana serta dana yang memadai, sehubungan dengan itu faktor-faktor tersebut merupakan kendala yang perlu dipecahkan sehingga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Institusi Daerah yang mempunyai fungsi kewenangan dalam hal perencanaan memerlukan dukungan seperti faktor-faktor tersebut.

Dalam Tahun Anggaran 2025 capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dapat digambarkan secara garis besar sebagai berikut:

1. Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja atau cara pengukuran kinerja yang digunakan dalam mengukur capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah, yaitu dengan membandingkan antara realisasi dan target yang tertuang dalam indikator kinerja sasaran. Semakin tinggi persentase perbandingan antara realisasi dengan target, maka semakin tinggi pula capaian kinerjanya. Seberapa besar capaian indikator sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, akan dapat dilihat dari seberapa persen rasio antara realisasi dan target yang terdapat pada masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

1.1 Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja Untuk Indeks Perencanaan Pembangunan dilakukan dengan mengukur capaian Sasaran Kabupaten, Sasaran Perangkat Daerah serta Capaian Program Perangkat Daerah dengan formula sebagai berikut:

Indeks Perencanaan Pembangunan = 60% sasaran Kabupaten + 20% sasaran Perangkat Daerah + 20% Capaian Program Perangkat daerah

Sedangkan Pengukuran Kinerja untuk Indeks Inovasi Daerah diukur berdasarkan Hasil Penilaian dari Kemendagri.

1. Indeks Perencanaan Pembangunan

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah, yang nantinya akan digunakan untuk perbaikan kinerja daerah dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Selain Indikator Kinerja Utama yang digunakan sebagai indikator dalam mengukur kinerja pemerintah daerah, juga ditetapkan suatu Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. Adapun Indikator kinerja utama perangkat nantinya akan menjadi dasar dalam penilaian kinerja organisasi setiap tahunnya.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah terdiri dari beberapa sasaran yang diukur keberhasilan pada Tahun 2025 dalam tabel berikut:

Tabel 12
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025

MISI	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
I. Mewujudkan Bolaang Mongondow Yang Berbudaya Dan Berdaya Saing.	Meningkatnya Akses Dan Kualitas Layanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	13,70		*Masih Menunggu Data Release
	Meningkatnya Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan Semesta	Rata-Rata Usia Harapan Hidup	69,65		*Menunggu Data Release
	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	6,75	6,98	
II. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Pembangunan Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	Meningkatnya Infrastruktur Transportasi	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Kendaraan	24,09		*Menunggu Data Release
		Persentase Panjang Jalan Dengan Kondisi Baik	69	336,59	
	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	55,00		*Menunggu Data Release
	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	95,43		*Menunggu Data Release
	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Tutupan Lahan	75,00		*Menunggu Data Release
III. Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Mandiri Bertumpu Pada Potensi Sumberdaya Lokal.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	Kontribusi Pertumbuhan Pdrb Sektor Industri Pengolahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	10,30	6,95 *(Bolmong Dalam Angka 2025)	*Menunggu Data Release
		Kontribusi Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Dan Perikanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	2	6,85 *(Bolmong Dalam Angka 2025)	*Menunggu Data Release
	Meningkatnya Daya Tarik Investasi Berskala Nasional	Persentase Peningkatan Nilai Investasi (Pma/Pmdn)	10		*Menunggu Data Release

IV. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik , Bersih, Demokratis Dan Bebas Kkn	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	KUNING (80)		*Menunggu Data Realase
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih	Opini Bpk	WTP	WTP (*Opini BPK Atas Laporan Keuangan Tahun 2024)	Masih Menunggu Hasil Penilaian BPK
		Nilai Sakip	BB	B (65,92) (*Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024)	Masih Menunggu Penilaian Kemenpan - RB
		Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3.7	3,0528 (*Hasil Penilaian Kemendagri Tahun 2024)	Masih Menunggu Penilaian dari Kemendagri
V. Mewujudkan Bolaang Mongondow Sebagai Lumbung Pangan Di Indonesia Bagian Timur	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Ketersediaan Pangan	Rasio Pangan	1,14	1,10	*Menunggu Data Realase

Untuk Pencapaian Indikator Utama Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025, mencapai lebih dari 60%. Dari 16 IKU Kabupaten.

Selain itu kita juga mengukur Tingkat pencapaian pada Indikator Kinerja Utama Pada Perangkat Daerah Tahun 2025.

Tabel 13

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal	Target Tahun 2025	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
I.	URUSAN WAJIB			
A.	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar			
1.	Pendidikan			
1.1.	Angka rata-rata lama sekolah (angka)	8,03	8,2	8,4
1.2.	Angka harapan lama sekolah (angka)	11,53	11,8	12
2.	Kesehatan			
2.1.	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	0,009	0,005	0
2.2.	Persentase Desa/Kelurahan UCI (%)	65,35	75,25	85,15
2.3.	Angka kelangsungan hidup bayi (angka)	-3,78	-1,36	0,055
2.4.	Angka Kematian Ibu melahirkan/100.000 Kelahiran Hidup (angka)	71,50	23,64	23,58
3.	Rumah Sakit			
3.1.	Rasio Angka Kematian (NDR) (%)	19	13	8
4.	Pekerjaan Umum dan Penataan Runag			
4.1.	Persentase Kondisi Jaringan irigasi dalam Kondisi Baik (%)	80	84	88
4.2.	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak (%)	68,67	73,20	76,20

4.3.	Rata-rata Persentase Layanan Akses Sanitasi Rumah Tangga Pada Bidang Pengelolaan Air Limbah Dan Drainase (%)	47,01	49,5	52,0
4.4.	Persentase Penyedia jasa Konstruksi Memenuhi Standar Kualifikasi (%)	100	100	100
4.5.	Persentase kesesuaian penataan ruang dengan RTRW Kabupaten	72,26	74,00	75,00
5	Perumahan dan Permukiman			
4.5.	Persentase rumah tidak layak huni tertangani (%)	33,80	80,91	100
4.6.	Cakupan Permukiman kumuh	0,70	0,042	0,029
6.	Kesatuan Bangsa dan Politik			
6.1.	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	95	97	99
7.	Polisi Pamong Praja			
7.1.	Persentase Kasus pelanggaran PERDA / PERKADA yang di Tindaklanjuti	40	70	90
7.1.	Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang tertangani	45	70	90
7.2.	Persentase Jumlah Kasus Kebakaran yang tertangani	70	70	90
8.	Sosial			
8.1.	Persentase Penurunan PMKS	5,4	2	2
8.2.	Persentase PSKS yang Berpartisipasi Aktif	84	93	98
B.	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar			
1.	Ketenagakerjaan			
1.1.	Angka partisipasi angkatan kerja (%)	65,4	70	75
1.2.	Persentase Tingkat pengangguran terbuka	3,74	5	4.2
1.3	Persentase Hubungan Industrial yang diselesaikan	70	75	90
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2.1.	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (Skala)	0,0039	50,00	0,0010
2.2.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Angka)	88,30	95.43	88,45
2.3.	Status Penilaian Kabupaten Layak Anak (Angka)	40,10	75,00	70,50
3.	Ketahanan Pangan			
3.1.	Rasio Pangan Daerah (skala)	0,96	1,08	1,2
4.	Lingkungan Hidup			
4.1.	Indeks Kualitas Air	44.55	50,00	60,00
4.2.	Indeks Kualitas Udara	95.43	95.43	95.43
4.3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	74.90	75,00	75,00
5.	Kependudukan dan Catatan Sipil			

5.1.	Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0 – 17 Thn	91,39	98,00	99,09
5.2.	Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak 0 – 16 Thn	45,00	55,00	65,00
5.5.	Cakupan penduduk berKTP per satuan penduduk	96,00	98,00	99,09
5.6.	Cakupan pasangan berakte nikah	52,74	87,00	92,00
5.7.	Perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan	8	2	16
5.8.	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan dukcapil	0	80,00	85,00
6.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
6.1.	Indeks Desa Membangun	17	20	24
7.	Pengendalian Penduduk dan KB			
7.1	Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate) (rasio)	2,43	2,42	2,41
7.2	Peserta KB aktif (%)	77,25	77,31	77,37
8.	Perhubungan			
8.1.	Rasio Angka kecelakaan Lalulintas terhadap jumlah perlintasan kendaraan selama satu tahun (angka)	0,000642	0,000642	0,000642
9.	Komunikasi dan Informatika			
9.1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,03	2,3	2,6
9.2.	Indeks Keterbukaan Informasi	35	45	55
10.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
10.1.	Kontribusi UKM Terhadap Total PDRB	15	21	25
11.	Penanaman Modal			
11.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	91,56	95	95
12.	Pemuda dan Olah Raga			
12.1.	Jumlah Cabang olahraga yang menyumbangkan medali (Emas, Perak, Perunggu) pada pekan olahraga tingkat provinsi (Cabor)	16	16	11
13.	Perpustakaan dan Kearsipan			
13.1.	Ratio Jumlah pengunjung perpustakaan (Skala)	0,15	0,79	0,99
13.4.	Persentase Pengelolaan Arsip secara terpadu (%)	10	14	18
14.	Kebudayaan			
14.1	Peningkatan publikasi dan Gelaran Seni Budaya Dan Tradisi Lokal	2	3	3
II.	URUSAN PILIHAN			
1.	Perikanan			
1.1.	Nilai Tukar Nelayan (Indeks)	103	105	107
2.	Pariwisata			
2.1.	Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Bolaang Mongondow	235.000	251.450	258.500

2.2	Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD (%)	0,17	0,40	0,47
3.	Pertanian			
3.1.	Angka Ketersediaan Pangan (%)	105,6	107	110
4.	Perkebunan			
4.1.	Rata-rata Persentase Peningkatan produksi Tanaman Perkebunan (6 Komditi) %	-12,73	-5,50	1,00
5.	Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral			
5.1.	Kontribusi Sektor perdagangan Besar dan Eceran terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Juta Rupiah)	1.013,20	1.133,20	1.253,20
5.2.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Juta Rupiah)	654,66	734,66	814,66
6.	Transmigrasi			
6.1.	Persentase Ketersediaan Kawasan transmigrasi	0	60	100
III.	FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN			
1.	Perencanaan Pembangunan Daerah			
1.1.	Indeks Perencanaan Pembangunan	90	93	95
1.3	Indeks Inovasi Daerah	7,28	30	38
2.	Keuangan Daerah			
2.1.	Capaian opini LHP BPK RI atas LKPD	WTP	WTP	WTP
2.2.	Persentase Peningkatan PAD	-7,96	10	10
2.3.	Persentase Nilai Aset Yang Tidak Bermasalah	91,24	96	98
3.	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan			
3.1.	Indeks Sistem Merit	0,6	0,8	1
4.	Inspektorat			
4.1.	Nilai Maturitas Kapabilitas APIP	2	2,6	3
4.2.	Level Maturitas SPIP Terintegrasi (angka)	2,1	2,6	3
5.	Penanggulangan Bencana Daerah			
5.1	Persentase Desa dan Kelurahan yang terlatih dalam menghadapi ancaman bencana	60	80	100
5.2	Persentase jumlah Korban Bencana yang ditangani	100	100	100
5.3	Persentase Infrastruktur Pasca Bencana yang di rehabilitasi dan rekonstruksi	30	50	70
6.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			
6.1.	Persentase Aspirasi Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	95	95	95
6.2.	Persentase Capaian Propemperda yang ditetapkan	40	97	99
7.	Sekretariat Daerah			
7.1.	Nilai Indeks Pelayanan Publik (Angka)	57,09	75	95
7.2.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	58,6	70	78
7.3.	Predikat Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP
7.4.	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	3.419	3.7	3,9

Sementara untuk Program sesuai pada Formula Indeks Perencanaan Pembangunan diukur kurang lebih 20% pencapaian keberhasilan Pada Program Perangkat Daerah. Secara Khusus Keberhasilan yang dicapai oleh Perangkat Daerah akan memperlihatkan capaian keberhasilan dari pada Program tersebut.

Tabel 14 Tingkat Pencapaian Program pada Perangkat Daerah Tahun 2025

No	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR	Target Kinerja Program		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2025	Kondisi Kinerja Akhir RPD	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	DINAS PENDIDIKAN					
1.01	URUSAN PEMERINTAAN BIDANG PENDIDIKAN					
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Terwujudnya pengelolaan pendidikan	Rata-Rata APM (Angka Partisipasi Murni) SD dan SMP	87,82	89,5	Dinas Pendidikan
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Terselenggaranya Pembelajaran Muatan Lokal sesuai kebutuhan dan karakter daerah	Persentase Sekolah Yang Menyelenggarakan Pembelajaran Muatan Lokal	100	100	Dinas Pendidikan
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Terdistribusinya pendidik dan tenaga kependidikan	Rasio Guru Terhadap Murid Pada Satuan Pendidikan PAUD, Dasar dan Menengah Pertama	11	15	Dinas Pendidikan
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Terselenggaranya Pengendalian perizinan Pendidikan	Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan	100	100	Dinas Pendidikan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	100	100	Dinas Pendidikan
	DINAS KESEHATAN					
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terselenggaranya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase FKTP Yang Tersertifikasi Akreditasi	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Terlaksananya Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan	72,95	100	Dinas Kesehatan
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Tersedianya Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase puskesmas dan apotik yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar	80,00	100	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	0,6	0,85	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Persentase Capaian Tertib Adminstrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	100,00	100	Dinas Kesehatan
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG					
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpenuhinya Standar Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah	Jumlah Standar Akreditasi Rumah Sakit Yang terpenuhi	14,00	16	Rumah Sakit Umum Daerah
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Terlaksananya Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan	72,75	100	Rumah Sakit Umum Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Persentase Capaian Tertib Adminstrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	100,00	100	Rumah Sakit Umum Daerah
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG					
1,03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG					

	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Terlaksananya Pemanfaatan Sumber Daya Air	Jumlah Bangunan Sumber Daya Air yang di Kelola	376	397	397 Unit
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Layanan Air Minum	Persentase Jaringan Instalasi Air Minum Terpasang dalam kondisi Baik	91	94	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan pengembangan sistem air limbah	Persentase layanan penyediaan sistem air limbah	32,02	38	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase layanan Jaringan Drainase Kabupaten	65	66	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Cakupan Penanganan Jalan	Panjang jalan dalam kondisi mantap	353,91	66,93	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya Keterampilan untuk Jasa Konstruksi	Cakupan Penyedia Jasa Konstruksi yang memiliki tenaga terampil	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen Kebijakan Penyesuaian RTRW Kabupaten dengan RTRW Provinsi dan Nasional	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
1,04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya rumah bagi korban bencana/relokasi program Kabupaten	Persentase rumah korban bencana yang tertangani	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 (sepuluh) Ha yang tertangani	Prosentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 (sepuluh) Ha yang tertangani	90,10	99,01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Tersedianya Rumah yang layak huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Rumah tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang tertangani	59,36	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Tersedianya prasarana, sarana dan utilitas Umum (PSU)	Persentase Penyediaan PSU Hunian yang Terbangun	69,1	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Tersedianya laporan pengembang perumahan bersertifikasi dan teregistrasi	Jumlah laporan pengembang yang bersertifikasi dan teregistrasi	1	1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Terlaksananya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terlaksana	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terlaksana	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terselenggaranya Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	70	90	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Terselenggaranya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non-Kebakaran	Persentase Pelaksanaan program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non-Kebakaran	70	90	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	75	90	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Terlaksananya Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten	Persentase bencana yang tertanggulangi	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	DINAS SOSIAL					
1,06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	Persentase PMKS yang mendapatkan Jaminan Sosial	10	10	Dinas Sosial
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya Perlindungan bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang Tertangani	100	100	Dinas Sosial
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang baik	Persentase Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan bagi PMKS	5	5	Dinas Sosial
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya Pemberdayaan bagi PSKS(Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang Aktif	Jumlah PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Aktif	14	48	Dinas Sosial
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	90	100	Dinas Sosial
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA					
2,07	URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA					
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Terselenggaranya Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Kerja	100		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Terwujudnya Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Direncanakan	70		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tersedianya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	30		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Tersedianya Pembinaan Hubungan Industrial	Persentase Pembinaan Hubungan Industrial Yang dilakukan	70		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	100	100	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
2,08	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	PROGRAM PENGARUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Capaian indeks pemberdayaan gender	80	84	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Prosentase Perempuan yang mendapatkan perlindungan	Persentase perempuan yang memperoleh perlindungan	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Terselenggaranya Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Keluarga yang mendapatkan Peningkatan Kualitas	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Terselenggaranya Pengelolaan Sistem Data gender dan Anak	Data Base gender dan Anak	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terlaksananya Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase lembaga yang memberikan layanan Pemenuhan hak anak	81	83	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Terselenggaranya Perlindungan Khusus Anak	Persentase Perlindungan Khusus Anak	0,00510	0,00751	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	95	95	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	DINAS KETAHANAN PANGAN					
2,09	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PANGAN					
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Tersedianya Infrastruktur Ketahanan Pangan Yang memadai	Persentase Lumbung Pangan Yang memadai berdasarkan Jumlah kecamatan	53,3	80	Dinas Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya Pola Pangan harapan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi	90	92	Dinas Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Terlaksananya Penanganan kerawanan pangan	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	0,5	1	Dinas Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya keamanan pangan daerah	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang lolos uji keamanannya di laboratorium	1	1	Dinas Ketahanan Pangan

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	100	100	Dinas Ketahanan Pangan
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
2,11	URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas perencanaan lingkungan hidup	Adanya PERDA RPPLH dan Dokumen KLHS	1	5	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Terkendalnya Pencemaran kerusakan lingkungan hidup	Cakupan Pengendalian terhadap lokasi Pencemaran / Kerusakan Lingkungan Hidup	2	5	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Bertambahnya Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Cakupan Ruang terbuka hijau Yang di Kelola	2,4	3,8	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Terselenggaranya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3	Cakupan Pengendalian B3 dan LB3	60,3	100	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan Terhadap Ijin Lingkungan dan Ijin PPLH	Cakupan Izin Lingkungan dan Izin PPLH	60,3	100	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Adanya Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait PPLH	Persentase Pengakuan terhadap Keberadaan MHA yang terkait dengan PPLH	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya Wawasan Kader Peduli Lingkungan	Persentase kader Peduli Lingkungan Yang Ditingkatkan	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Adanya Penghargaan LH Untuk Masyarakat	Akumulasi Jumlah Masyarakat Yang Memperoleh Penghargaan LH	11	17	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Terlaksananya Penanganan Pengaduan LH	cakupan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Terlaksananya Pengelolaan Persampahan yang tertangani	Persentase Penanganan Sampah	99	100	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
	DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL					
2,12	URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Terlaksananya Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Capaian Pendaftaran Penduduk	90	93	Dukcapil
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Terlaksananya Program Pencatatan Sipil	Persentase Capaian Pencatatan Sipil	85	95	Dukcapil
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Terlaksananya Program Informasi Administrasi Kependudukan	jumlah dokumen Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3	12	Dukcapil
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Terlaksananya Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen Evaluasi dan Pelaporan Adminduk	3	12	Dukcapil
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tertib dan Akuntabel	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	100	100	Dukcapil
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2,13	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
	PROGRAM PENATAAN DESA	Terlaksananya penataan desa	Persentase jumlah Desa yang kewenangannya tertata	70	90	Dinas Pemberayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Meningkatnya Kerjasama antar Desa Di Bolaang Mongondow	Jumlah Bumdes	188	191	Dinas Pemberayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Program Administrasi Pemerintah Desa	Persentase pelaksanaan program Administrasi Pemerintahan Desa	100	100	Dinas Pemberayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	25	25	Dinas Pemberayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tertib dan Akuntabel	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	100	100	Dinas Pemberayaan Masyarakat dan Desa
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					

2,14	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalnya Pertumbuhan Penduduk	Cakupan Data Keluarga berencana (KB)	85	85	DPPKB
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya Prevalensi Peserta KB Aktif	Persentase Kesertaan Keluarga dalam ber KB	77,31	77,37	DPPKB
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatkan Ketahanan Keluarga (KS)	Cakupan Kualitas Keluarga	85	90	DPPKB
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang tertib dan Akuntabel	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	100	100	DPPKB
	DINAS PERHUBUNGAN					
2,15	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERHUBUNGAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang tertib dan Akuntabel	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	100	100	Dinas Perhubungan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Terwujudnya Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan Yang Aman Nyaman dan Lancar	Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan (Persen)	22,92	27,24	Dinas Perhubungan
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
2,16	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatkan penerapan E-Government SKPD	Persentase OPD yang menerapkan e-Government	87,76	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya Pengelolaan Informasi Publik	Persentase Capaian Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	100	1	Dinas Komunikasi dan Informatika
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tertib dan Akuntabel	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
2,20	URUSAN PEMERINTAH BIDANG STATISTIK					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedianya data Pembangunan Daerah yang tepat waktu	Jumlah data Pembangunan Daerah yang tepat waktu	2	8	Dinas Komunikasi dan Informatika
2,21	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERSANDIAN					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya Keamanan Sistem Persandian	Persentase peningkatan Keamanan Sistem Persandian	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH					
2,17	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Terlaksananya Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	9%	12%	Dinas Koperasi dan UKM
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Terselenggaranya Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase koperasi yang aktif dan berkualitas	50%	60%	Dinas Koperasi dan UKM
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya Koperasi KSP/USP yang Dinilai Kesehatan Koperasi	Persentase Koperasi KSP/USP yang Dinilai Kesehatannya Koperasi	27%	31%	Dinas Koperasi dan UKM
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Persentase Pelatihan Perkoperasian yang mengikuti Diklat	75%	85%	Dinas Koperasi dan UKM
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Terselenggaranya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Peningkatan SDM UKM dan Kewirausahaan	23%	25%	Dinas Koperasi dan UKM
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Terselenggaranya Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro yang di Berdayakan	21%	23%	Dinas Koperasi dan UKM
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Terselenggaranya Program Pengembangan Umum	Persentase Peningkatan Modal Usaha	90 %	90 %	Dinas Koperasi dan UKM
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tertib dan Akuntabel	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	Dinas Koperasi dan UKM
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
2,18	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL					
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Pelaku Usaha Yang Berinvestasi Di Bolaang Mongondow	Jumlah Pelaku Usaha	1200	1400	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya jumlah Investor yang melaksanakan penanaman modal	Jumlah Investor Yang Mengurus Perijinan	7	7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya iklim penanaman modal	Persentase pelaku usaha yang memiliki ijin usaha	0,7	0,9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya penyelesaian permasalahan pengaduan	Persentase permasalahan pengaduan yang diselesaikan	95	95	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Terwujudnya Aplikasi Pengelolaan Data penanaman Modal secara efektif	Persentase Aplikasi Pengelolaan Data Penanaman Modal yang dimanfaatkan	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tertib dan Akuntabel	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA					
2,19	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Terselenggaranya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang dikembangkan	25	100	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Terselenggaranya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif	100	100	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya kapasitas daya saing Kepemudaan	Jumlah Pemuda pelopor dan pemuda kader yang diberdayakan	251	1195	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	100	100	Dinas Pemuda Dan Olahraga
2,22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN					
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Terlaksanannya Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan Pengembangan Kebudayaan dan pelaku seni budaya	70	70	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Terlaksanannya Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan Kesenian yang Dikembangkan	70		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Terlaksanannya Pelestarian Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang Terdata	26	35	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
2,23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Terselenggaranya Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan Yang Dibina	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2,24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					
	PROGRAM PENGELOLAAN KEARSIPAN	Terlaksanannya Pengelolaan Kearsipan	Persentase jumlah arsip yang diolah	10	20%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	terwujudnya perlindungan dan penyelamatan arsip	persentase jumlah arsip yang dilindungi dan diselamatkan	10	20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
	DINAS PERIKANAN					
3,25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Laju pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	1,72	1,72 %	Dinas Perikanan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Angka Produksi Perikanan Budidaya	600	1000	Dinas Perikanan
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Menurunnya Kegiatan Ilegal Fishing	Jumlah Kegiatan Ilegal Fishing	3	1	Dinas Perikanan
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMERIKANAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya Produksi Olahan hasil Perikanan	Jumlah Jenis Produksi Olahan Hasil Perikanan	4	6	Dinas Perikanan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	100	100	Dinas Perikanan
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN					
3,26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Terlaksanannya Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	70	70	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Terpenuhinya Promosi Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan mancanegara dan Wisatawan Nusantara	75	75	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	95	95	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	DINAS PERTANIAN					
3,27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					

	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tersedianya Varietas Benih/Bibit Yang bersertifikat	Jumlah Bibit Yang Bersertifikat	6	8	DINAS PERTANIAN
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Terselenggaranya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase jumlah kasus yang tertangani	100	100	DINAS PERTANIAN
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Terselenggaranya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase wilayah yang terkendali dan tertanggulangi akibat bencana	100	100	DINAS PERTANIAN
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Terselenggaranya Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Rata-rata Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Tanaman Perkebunan (16 Komoditi)	1	2	DINAS PERTANIAN
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Terselenggaranya penyuluhan pertanian	Rasio Jumlah Penyuluh Dengan Jumlah Desa / Kelurahan Yang mempunyai Lahan Pertanian/ Perkebunan	1,13	1,25	DINAS PERTANIAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Persentase Capaian Tertib Adminstrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	100	100	DINAS PERTANIAN
	DINAS PERKEBUNAN					
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tersedianya Varietas Benih/ Bibit Tanaman Perkebunan Yang Bersertifikat	Jumlah Varietas benih/bibit yang bersertifikat	6	6	Dinas Perkebunan
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Terselenggaranya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	1	1,5	Dinas Perkebunan
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Terselenggaranya Penyuluhan Pertanian	Rasio Jumlah Penyuluh Dengan Jumlah Desa / Kelurahan Yang mempunyai Lahan Pertanian/ Perkebunan	0,03	0,12	Dinas Perkebunan
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Terlaksananya pengendlaian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase wilayah yang terkandali dan tertanggulangi akibat bencana	0,64	2,32	Dinas Perkebunan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Persentase Capaian Tertib Adminstrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	87,5	89,17	Dinas Perkebunan
	DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM					
3,30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya Sarana Perdagangan (pasar) yang dimanfaatkan Oleh Pelaku Usaha	Persentase Sarana Perdagangan Yang Berfungsi (Pasar)	100	100	Dinas Perdagangan dan ESDM
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tercapainya stabilisasi harga Barang Kebutuhan pokok	Koefisien Variasi Harga Bapok dan Barang Penting Secara Antar Waktu	10	11	Dinas Perdagangan dan ESDM
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya pelaku usaha ekspor produk komoditi unggulan daerah	Jumlah Pelaku Usaha	8	12	Dinas Perdagangan dan ESDM
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Tercapainya standardisasi bidang metrologi legal dan perlindungan konsumen	Persentase Capaian Tera Ulang	100	100	Dinas Perdagangan dan ESDM
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Pelaku Usaha Yang Menjual Khusus Produk Dalam Negeri	98	98	Dinas Perdagangan dan ESDM
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha di bidang perijinan	Persentase Pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang terdaftar dan memiliki ijin usaha	98,6	100	Dinas Perdagangan dan ESDM
	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Terkelolanya potensi energi terbarukan	Persentase Pengelolaan Energi terbarukan berdasarkan potensi	25	75	Dinas Perdagangan dan ESDM
3,31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Kabupaten	Perda perencanaan Pembangunan Industri Kabupaten	1	1	Dinas Perdagangan dan ESDM
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	Terkendalnya ijin usaha industri kabupaten	Persentase IKM yang memiliki izin usaha	30,45	50	Dinas Perdagangan dan ESDM
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Sistem Informasi Pengelolaan Industri nasional	Persentase Industri Yang Terdaftar di Sistem Informasi Industri Nasional	3,4	20	Dinas Perdagangan dan ESDM
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Persentase Capaian Tertib Adminstrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	100	100	Dinas Perdagangan dan ESDM
	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA					
3,32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Tersedianya Kawasan Transmigrasi	Persentase Ketersediaan Kawasan Transmigrasi	60		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
4,01	SEKRETARIAT DAERAH					

	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	7,38	7	Bagian PBJ
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	7,38	7	Bagian Perekonomian dan SDA
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	7,38	7	Bagian Pembangunan
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Kinerja Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	100	100	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Kinerja Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	100	100	Bagian Tata Pemerintahan
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Kinerja Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	100	100	Bagian Hukum
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Yang Tertib dan Akuntabel	Persentase Capaian Tertib Administrasi umum	100	100	Bagian Organisasi
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Yang Tertib dan Akuntabel	Persentase Capaian Tertib Administrasi umum	100	100	Bagian Hukum
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Yang Tertib dan Akuntabel	Persentase Capaian Tertib Administrasi umum	100	100	Bagian Protokol dan Pimpinan
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Yang Tertib dan Akuntabel	Persentase Capaian Tertib Administrasi umum	100	100	Bagian Perencanaan dan Keuangan
4,02	SEKRETARIAT DEWAN					
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terselenggaranya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	83	83	Sekretariat DPRD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Yang Tertib dan Akuntabel	Persentase capaian Tertib Administrasi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	100	100	Sekretariat DPRD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
5,01	PERENCANAAN					
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Dilaksanakan	90	90	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terlaksananya Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	90	95	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Terselenggaranya Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Penelitian dan Pengembangan Yang Dilaksanakan	90	90	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Yang Tertib dan Akuntabel	Persentase capaian Tertib Administrasi penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	92	95	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	BADAN KEUANGAN DAERAH					
5,02	KEUANGAN					
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase perangkat daerah yang tidak ada temuan menyangkut pengelolaan keuangan oleh instansi pemeriksa	91.23	91.23	Badan Keuangan Daerah
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Nilai Aset yang tidak bermasalah	100	100	Badan Keuangan Daerah
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terselenggaranya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10	10	Badan Keuangan Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Yang Tertib dan Akuntabel	Persentase capaian Tertib Administrasi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	95	95	Badan Keuangan Daerah
	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
5,03	KEPEGAWAIAN					
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Terwujudnya Aparatur Pemerintahan Sesuai Kompetensi Yang Dibutuhkan	Indeks Profesionalitas ASN	60	80	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5,04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					

	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Terselenggaranya Pengembangan SDM	Rasio Pengembangan Kompetensi	0,75	1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Yang Tertib dan Akuntabel	Persentase capaian Tertib Administrasi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	80	100	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
6,00	UNSUR PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH					
6,01	INSPEKTORAT					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan	275	275	Inspektorat
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistennsi	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pendampingan dan Pemberantasan Korupsi	10	10	Inspektorat
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Yang Tertib dan Akuntabel	Persentase capaian Tertib Administrasi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	100	100	Inspektorat
7,00	UNSUR KEWILAYAHAN					
7,01	KECAMATAN					
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Persentase desa / kelurahan yang terjamin Stabilitas Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90	100	Kecamatan
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terselenggaranya pembangunan partisipatif di tingkat desa	Persentase perencanaan pembangunan Partisipatif yang terakomodir	65	75%	Kecamatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terselenggaranya pencegahan covid-19	Persentase masyarakat yang telah menerima vaksin	85	95	Kecamatan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	100	100	Kecamatan
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
8,01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Terselenggaranya Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase pelaksanaan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	100	Kesbangpol
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Terlaksananya Program Peningkatan Peran Partai Politik dan lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100	100	Kesbangpol
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	terselenggaranya Program Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi Kemasyarakatan	28	112	Kesbangpol
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Terselenggaranya Program Peningkatan kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	persentase pelaksanaan Program Peningkatan kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100	100	Kesbangpol
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	100	100	Kesbangpol

2. Indeks Inovasi Daerah

Pengukuran Kinerja pada Sasaran Indikator Indeks Inovasi Daerah dinilai berdasarkan hasil dari Kementerian Dalam Negeri, sesuai dengan Indikator Satuan Pemerintah Daerah dan Indikator Satuan Inovasi Daerah.

Pengukuran kinerja tahun 2025 dilakukan dengan melihat indikator kinerja pada level sasaran tahun 2025. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang

terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Dalam rangka pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa program atau kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2025 dilakukan melalui tahapan yang mencakup:

1. Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).
2. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), di mana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

1.2 Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

> 85	= Sangat berhasil
$70 < X \leq 85$	= Berhasil
$55 < X \leq 70$	= Cukup Berhasil
≤ 55	= Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini. Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai *mean* (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator kinerja sasaran yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jlh Indikator utk setiap kategori} \times \text{Nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah Indikator kinerja sasaran}}$$

Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Sangat Berhasil	:	92,5
Berhasil	:	77,5
Cukup Berhasil	:	62,5
Tidak Berhasil	:	27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori *sangat berhasil*, *berhasil*, *cukup berhasil*, dan *tidak berhasil*.

2. PENGUKURAN TINGKAT PENCAPAIAN SASARAN

Pengukuran tingkat capaian realisasi kinerja Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 dengan realisasinya.

2.1 Sasaran I, "*Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah*". Dengan indikator sasaran "*Indeks Perencanaan Pembangunan*". Hasil capaian sasaran I adalah 100% dengan kategori "Sangat Berhasil".

Indeks Perencanaan Pembangunan = 60% sasaran Kabupaten + 20% sasaran Perangkat Daerah + 20% Capaian Program Perangkat daerah

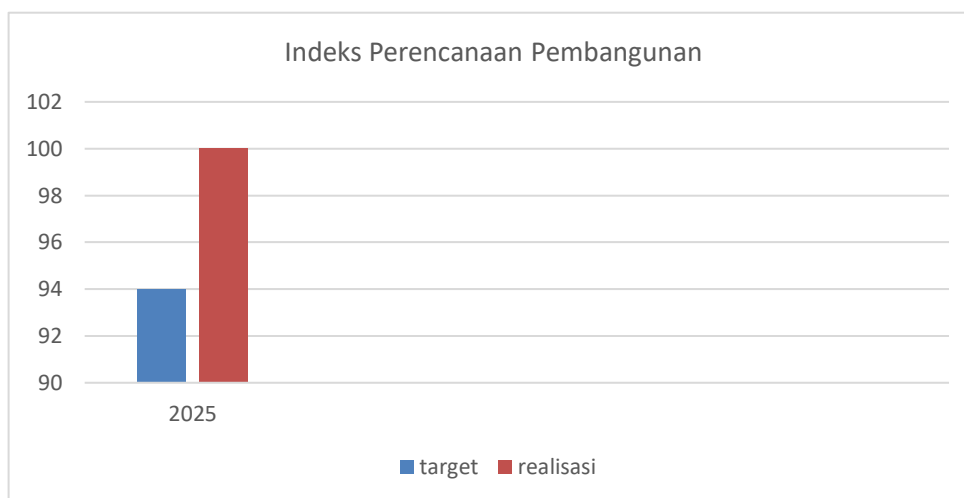
a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 15 Capaian Kinerja Tahun 2025 Indikator Sasaran I

INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN TAHUN 2024			TARGET AKHIR RENSTRA
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Indek Perencanaan Pembangunan (%)	94	100	106%	95

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2025 dari target 94 dan yang terealisasi sebesar 100 dengan capaian kinerja tahun 2025 adalah 100 maka pencapaian target tujuan kinerja sasaran Bappeda adalah kategori "*Sangat Berhasil*", yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 1. Capaian Kinerja Tahun 2024 Indikator Sasaran I



Sebagai gambaran pada tahun 2025 untuk pemenuhan indikator kinerja di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan dua pendekatan yaitu:

1. Berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:
 - a. Teknokratik;
 - b. Partisipatif;
 - c. Politis; dan
 - d. Atas-bawah dan bawah-atas.
2. Berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:
 - a. Holistik-tematik;
 - b. Integratif; dan
 - c. Spasial.

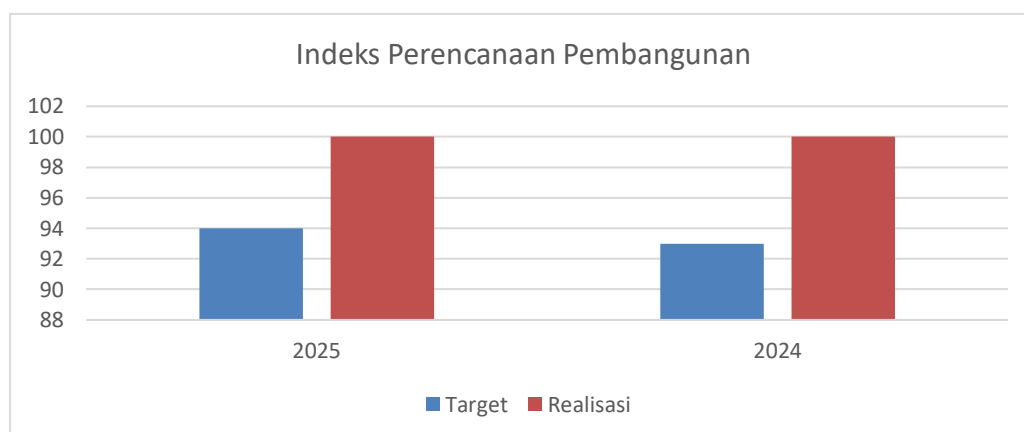
b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Tabel 16 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024
Indikator Sasaran I

INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN TAHUN 2024 (%)	CAPAIAN TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Indeks Perencanaan Pembangunan (%)	107%	94	100	106%

Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow melaksanakan tahapan-tahapan perencanaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sehingga target indikator Tahun 2025 dapat tercapai sebesar 106%, capaian yang sama diperoleh pada Tahun 2024

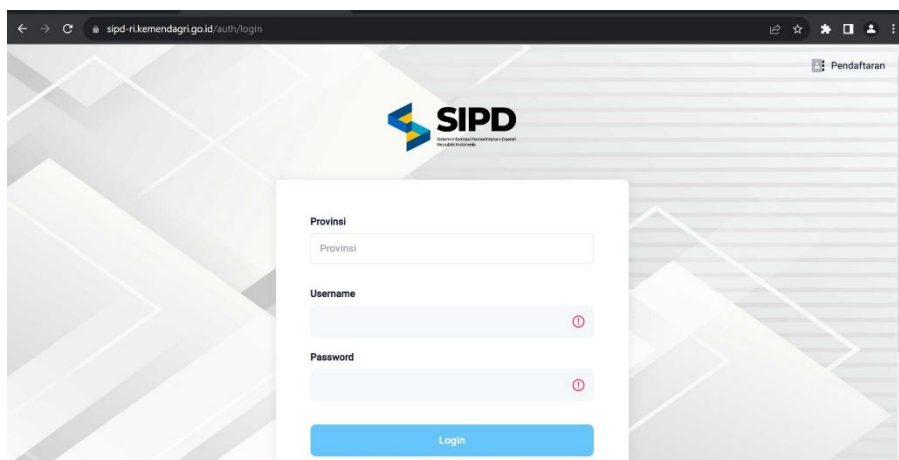
Grafik 2. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024



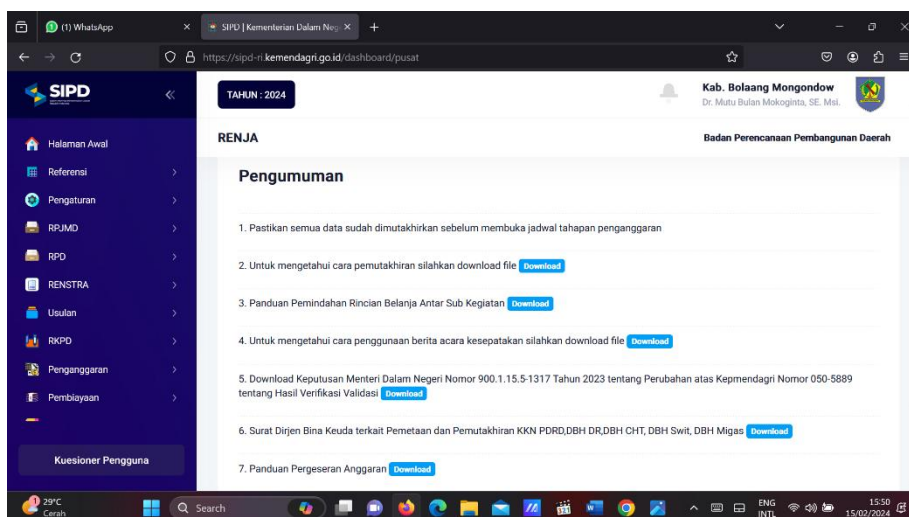
Bappeda dalam Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow 2025 dan keterkaitan RKPD dengan RPD Kabupaten dan RKPD Provinsi serta Konsistensi, kelengkapan dan kedalaman serta keterukuran RKPD dilakukan dengan penginputan pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang terintegrasi antar dokumen perencanaan (RPD, RENSTRA, RKPD, RENJA), e-Musrenbang dan e-Pokir kedalam satu sistem.

Pada Tahun 2025 BAPPEDA Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yang telah menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) yang terintegrasi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam hal Perencanaan, khususnya perencanaan program dan kegiatan untuk Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Gambar 1. Laman awal Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)



Gambar 2. Tampilan Menu Perencanaan pada SIPD



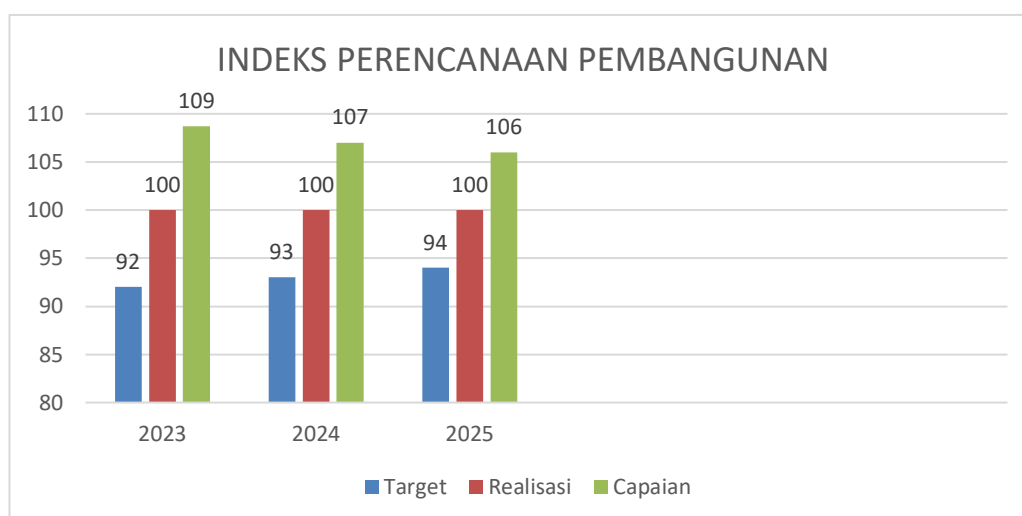
- c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Hasil capaian kinerja pada Sasaran I dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah
pada Indikator Sasaran I

INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN TAHUN 2023			CAPAIAN TAHUN 2024			CAPAIAN TAHUN 2025			CAPAIAN AKHIR RENSTRA
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	
Indeks Perencanaan Pembangunan	92	100	109	93	100	107	94	100	106	95

Grafik 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Indikator Sasaran I



d. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam pencapaian indikator sasaran tidak lepas dari beberapa faktor yang menjadi penghambat kinerja Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow di tahun 2025 antara lain:

1. Tidak tercapainya target indikator kinerja Pemerintah Daerah akibat adanya anggaran yang kurang memadai.
2. Tidak optimalnya Sumber Daya Manusia yang mengelola Program dalam Perangkat Daerah untuk pencapaian tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.
3. Adanya perubahan regulasi terkait penetapan target pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

Meskipun dengan adanya faktor-faktor penghambat kinerja tersebut, pada tahun 2025 tetap dapat meraih presentase target kinerja yang baik. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah:

1. Dukungan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam pelaksanaan program kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan.
2. Adanya komunikasi yang baik antara Bappeda dan Perangkat Daerah mulai dari perencanaan hingga pencapaian Indikator Kinerja Utama.
3. Adanya Kemudahan dalam memperoleh informasi terkait pencapaian kinerja Pemerintah Daerah.

Alternatif/solusi dalam pencapaian sasaran adalah:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi melalui aplikasi e-monev secara berkala.
2. Mendorong Perangkat Daerah dalam hal Perencanaan dan Penganggaran untuk pelaksanaan Program yang tepat sasaran yang mendorong pencapaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
3. Meningkatkan Kompetensi Perencana dalam melakukan pendampingan kepada setiap OPD dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Jika dikaitkan antara realisasi kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik yaitu 100% dengan penyerapan anggaran program pendukung sebesar 93.94% menunjukkan bahwa tingkat efisiensi indikator kinerja penggunaan Sumber daya adalah 6,06% dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18

Tingkat Efisiensi Pada Indikator Sasaran I

Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3= (1-2)</i>
100	93.94	6.06

Rumus Tingkat Efisiensi:

Realisasi Kinerja – Realisasi Anggaran= Tingkat Efisiensi

100% - 93,94% = 6,06 (Tingkat Efisiensi)

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Untuk mendukung/menunjang capaian Cakupan kesesuaian program perencanaan terhadap APBD, didukung oleh kinerja dari masing-masing bidang sebagai pengampu program ataupun kegiatan yang ada di Bappeda. Pelaksanaan program dan kegiatan yang cukup berdampak pada pencapaian target, diantaranya:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Tabel 19 Program Pendukung Pada Indikator Sasaran I

INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	4	
Indeks Perencanaan Pembangunan	100	Program Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 631.030.722,60	Rp. 600.065.575,00	95.09
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 832.052.166,00	Rp. 762.975.351,00	91.70
JUMLAH			Rp.1.463.082.888,60	Rp. 1.363.040.926,00	93.16

2.2 Sasaran II, "Meningkatnya Daya Saing Daerah Melalui Inovasi". Dengan indikator sasaran "Indeks Inovasi Daerah". Hasil capaian sasaran Indeks Inovasi Daerah tahun 2025 ini adalah 39,58 dari target sebesar 35, dengan kategori "Sangat Berhasil".

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 20 Capaian Kinerja Tahun 2025 Indikator Sasaran II

INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN TAHUN 2024			SKALA PENGUKURAN
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Indeks Inovasi Daerah	30	39,58	131%	Sangat Berhasil

Dari tabel di atas berdasarkan skala pengukuran ordinal bahwa capaian target kinerja sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2025 rata-rata pencapaian target tujuan kinerja sasaran tersebut adalah kategori "Sangat Berhasil", yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 4. Capaian Tahun 2025 Indikator Sasaran II



Faktor yang mempengaruhi capaian Indikator Sasaran ini adalah Jumlah Inovasi yang dilaksanakan oleh SKPD yang didukung oleh Regulasi terkait Inovasi yang

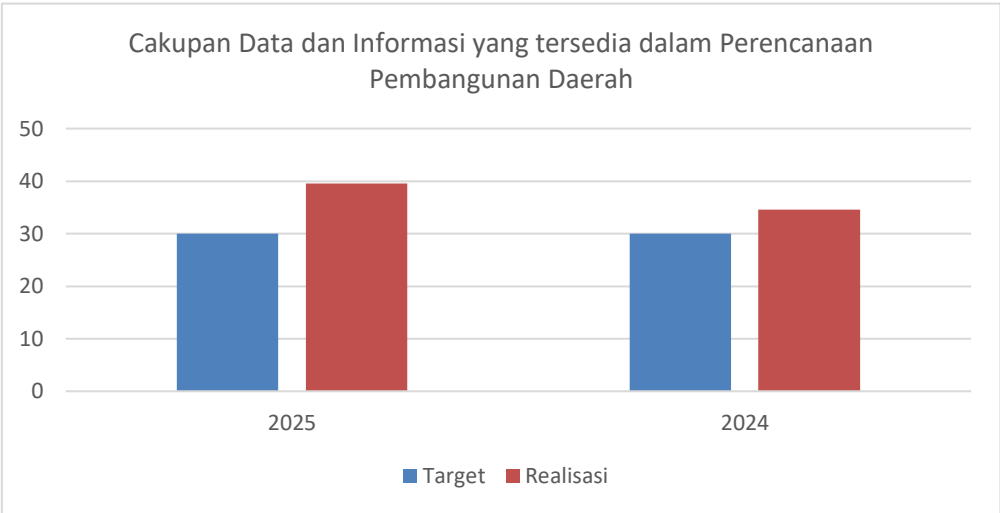
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan Metode Penilaian Indeks Inovasi Daerah dari Kementerian Dalam Negeri.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Tabel 21 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023
pada Indikator Sasaran II

INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN TAHUN 2024			CAPAIAN TAHUN 2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Inovasi Daerah	30	34,56	115%	30	39,58	131%

Grafik 5. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Tahun 2024 dan Tahun 2025



Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa nilai realisasi Tahun 2024 yaitu 34,56 sedangkan untuk tahun 2025 yaitu nilai realisasi adalah 39,58 berdasarkan penilaian dari Kemendagri.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

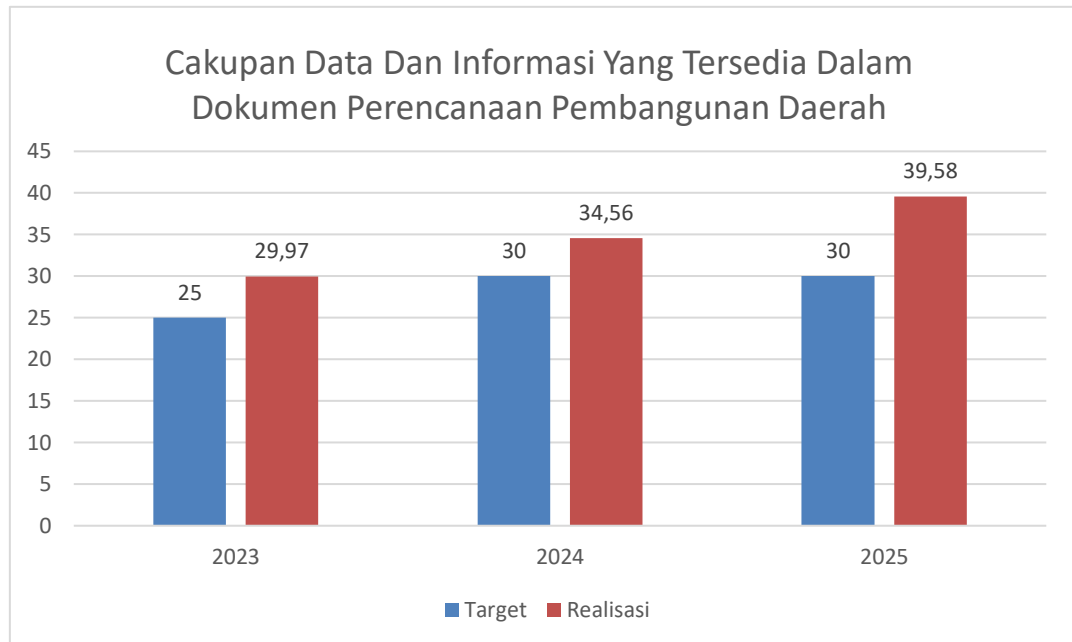
Hasil capaian kinerja pada indikator sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 22 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Menengah pada
Indikator Sasaran II

INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN TAHUN 2023			CAPAIAN TAHUN 2024			CAPAIAN TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	
Indeks Inovasi Daerah	25	29,97	120	30	34,56	115	30	39,58	131	35

Indikator Indeks Inovasi Daerah berdasarkan tabel di atas, Realisasi tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 disajikan pada grafik berikut ini :

Grafik 6. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Indikator Sasaran I



d. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam pencapaian indikator sasaran tidak lepas dari beberapa faktor yang menjadi penghambat kinerja Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow di tahun 2024 antara lain:

1. Kurangnya Inovasi Perangkat Daerah.
2. Kurangnya kematangan inovasi yang diusulkan oleh Perangkat Daerah.

Alternatif/solusi dalam permasalahan yang terjadi adalah:

1. Memperkuat Regulasi terkait Inovasi Daerah.
2. Melaksanakan Lomba Inovasi Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow untuk menginventarisir Inovasi Daerah dengan Kematangan sesuai Kebutuhan Pengukuran Indeks Inovasi Daerah.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Jika dikaitkan antara realisasi kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik yaitu 100% dengan penyerapan anggaran program pendukung sebesar 89.37% menunjukkan bahwa tingkat efisiensi

indikator kinerja penggunaan Sumber daya adalah 10,63% dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23 Tingkat Efisiensi Indikator Sasaran II

Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3= (1-2)
100	93.24	6.76

Rumus Tingkat Efisiensi :

Realisasi Kinerja – Realisasi Anggaran= Tingkat Efisiensi

100% - 93,24% = 6,76 (Tingkat Efisiensi)

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Untuk mendukung/menunjang capaian Cakupan kesesuaian program perencanaan terhadap APBD, didukung oleh kinerja dari masing-masing bidang sebagai pengampu program ataupun kegiatan yang ada di Bappeda. Pelaksanaan program dan kegiatan yang cukup berdampak pada pencapaian target, adalah Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Tabel 24 Program Pendukung Pada Indikator Sasaran I

INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
Indeks Inovasi Daerah	100	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 266.284.882	Rp. 248.275.036	93.24

B. REALISASI ANGGARAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow melaksanakan program urusan perencanaan yang dijabarkan ke dalam kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun anggaran 2025, Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow memperoleh sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk DPPA-SKPD tahun anggaran 2025.

1. Anggaran dan Realisasi APBD

Jumlah anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow APBD-P Tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 6.961.350.860,60. Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2025 sebesar Rp. 6.539.827.394,00

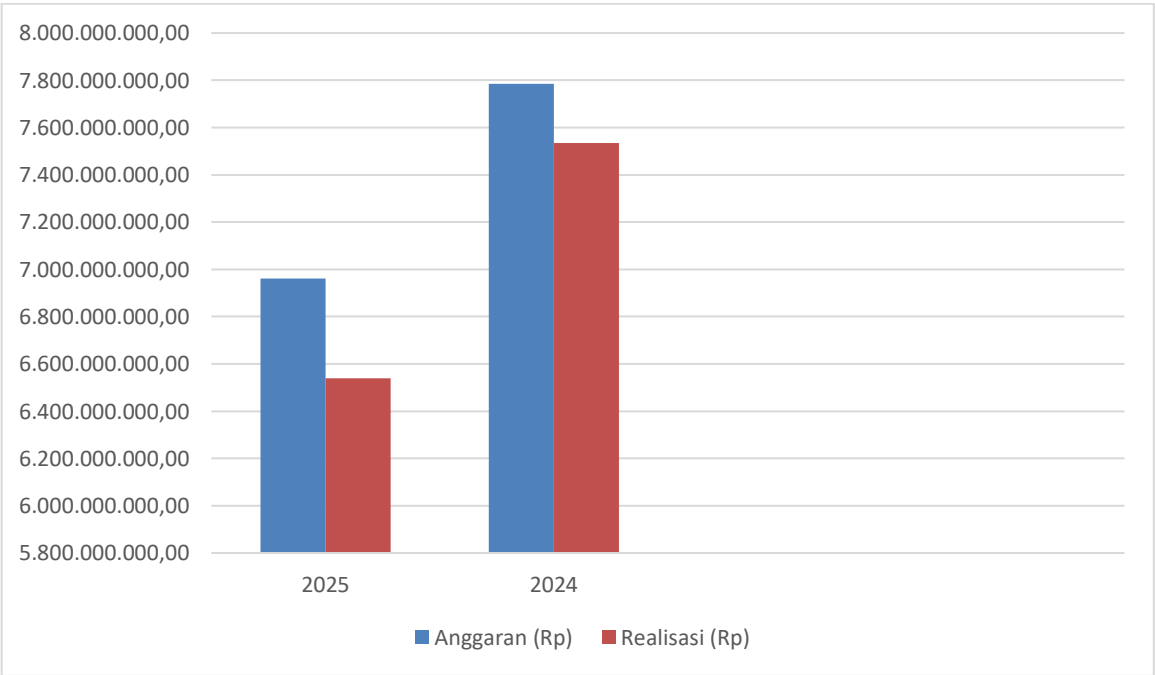
(93,94%). Rincian anggaran, sumber dana (DAU) dan realisasi program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 25 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024

JENIS BELANJA	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
BELANJA	7.785.481.545,00	7.534.541.034,00	96,78	6.961.350.860,60	6.539.827.394,00	93,94
Belanja Pegawai	3.879.309.584,00	3.778.805.927,00	97,41	4.162.879.279,00	3.891.266.747,00	93,47
Belanja Barang dan Jasa	3.828.412.883,00	3.678.985.107,00	96,01	2.586.841.781,60	2.439.634.648,00	94,30
Belanja Modal	77.759.078,00	76.750.000,00	98,70	211.629.800,00	208.925.999,00	98,72

Capaian realisasi anggaran dapat dinilai dengan skala tingkat pencapaian terhadap target tahun anggaran 2025 rata-rata mencapai target yang telah ditentukan dengan skala tingkat capaian adalah kategori "*Berhasil*". Pencapaian realisasi anggaran tahun 2025 meningkat dibandingkan dengan tahun anggaran 2024.

Grafik 7. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dan Tahun 2024



2. Anggaran dan Realisasi per Kegiatan

Realisasi anggaran dengan capaian kinerja terhadap target yang telah ditentukan untuk setiap masing-masing program dan kegiatan di Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2025 diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 26. Realisasi Anggaran Bappeda Tahun 2025

No	NAMA KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	%
	BAPPEDA		6.961.350.860,60	6.539.827.394,00	93,94
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5.231.983.090,00	4.928.511.432,00	94,20
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.214.923.413,00	3.943.302.729,00	93,56
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.150.879.279,00	3.879.266.747,00	93,46
	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	64.044.134,00	64.035.982,00	99,99
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		29.247.500,00	28.555.514,00	97,63
	3	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	29.247.500,00	28.555.514,00	97,63
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah		436.038.752,00	435.068.815,00	99,78
	4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.141.180,00	10.472.850,00	94,00
	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.576.619,00	4.482.684,00	97,95
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	420.320.953,00	420.113.281,00	99,95
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		226.629.800,00	223.925.984,00	98,81
	7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	226.629.800,00	223.925.984,00	98,81
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		142.831.800,00	141.133.500,00	98,81
	8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.711.800,00	36.133.500,00	95,81
	9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	105.120.000,00	105.000.000,00	99,89
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		182.311.825,00	156.524.890,00	85,86
	10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	163.579.840,00	138.303.910,00	84,55
	11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.080.000,00	9.920.550,00	98,42
	12	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.651.985,00	8.300.430,00	95,94

II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		631.030.722,60	600.065.575,00	95,09
6	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		464.237.637,60	444.236.178,00	95,69
	13	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengn Dokumen Kebijakan Lainnya	296.356.133,60	294.610.866,00	99,41
	14	Pelaksanaan Konsultasi Publik	23.345.352,00	14.216.400,00	60,90
	15	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	6.594.402,00	5.508.377,00	83,53
	16	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/kota	42.651.929,00	36.010.635,00	84,43
	17	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	18.613.824,00	18.341.047,00	98,53
	18	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/kota	76.675.997,00	75.548.853,00	98,53
7	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		15.681.411,00	15.279.612,00	97,44
	19	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	15.681.411,00	15.279.612,00	97,44
8	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		151.111.674,00	140.549.785,00	93,01
	20	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/kota	91.897.733,00	89.233.208,00	97,10
	21	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	59.213.941,00	51.316.577,00	86,66
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		832.052.166,00	762.975.351,00	91,70
9	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		442.797.681,00	413.464.406,00	93,38
	22	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	135.379.113,00	129.581.850,00	95,72

	23	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	185.809.999,00	183.506.260,00	98,76
	24	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	64.927.104,00	61.348.907,00	94,49
	25	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	56.681.465,00	39.027.389,00	68,85
10	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		167.750.800,00	161.693.036,00	96,39
	26	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	76.353.500,00	74.307.653,00	97,32
	27	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	22.415.700,00	21.162.033,00	94,41
	28	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	68.981.600,00	66.223.350,00	96,00
11	Koordinasi Perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		221.503.685,00	187.817.909,00	84,79
	30	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	55.959.959,00	44.062.637,00	78,74
	31	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	81.573.904,00	71.874.167,00	88,11
	32	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	83.969.822,00	71.881.105,00	85,60
III	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		266.284.882,00	248.275.036,00	93,24

12	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		123.092.179,00	121.848.388,00	98,99
	33	Pengelolaan Data Kelitangan dan Peraturan	123.092.179,00	121.848.388,00	98,99
13	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		143.192.703,00	126.426.648,00	88,29
	34	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Tekhnoologi dan Inovasi	87.392.290,00	77.023.874,00	88,14
	35	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif	55.800.413,00	49.402.774,00	88,53

Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian realisasi kinerja keuangan antara lain adalah:

- 1) Perencanaan anggaran kegiatan sedapat mungkin disesuaikan dengan kebutuhan;
- 2) Adanya efisiensi anggaran beberapa kegiatan.
- 3) Adanya pergeseran dan penambahan anggaran belanja untuk kebutuhan program dan kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026 serta Penetapan kinerja tahun 2025 dalam rangka perwujudan *good governance* yang menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow pada Tahun Anggaran 2025. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisa kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Hasil laporan akuntabilitas kinerja Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) indikator sasaran dengan kinerja baik.

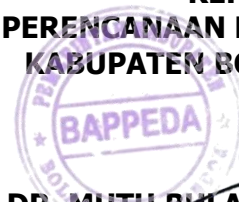
Sepanjang tahun 2025, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow telah secara optimal mengupayakan terselenggaranya kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut di atas. Secara umum dapat terlihat bahwa pencapaian target kinerja sasaran dan program/kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian kinerja rata-ratanya adalah sangat baik.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur Bappeda pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 sebagai bahan evaluasi atas keberhasilan atau kegagalan dari suatu instansi Pemerintah dalam pelaksanaan visi, misi serta tugas pokok dan fungsinya.

Lolak, Januari 2026

**KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**



DR. MUTU BULAN MOKOGINTA, SE, M.Si
NIP. 19710409 199803 1 013